

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT
TAHUN ANGGARAN 2017- 2019***FINANCIAL PERFORMANCE ANALYSIS OF BANGGAI LAUT REGENCY GOVERNMENT
FOR FISCAL YEAR 2017-2019*

Oleh:
Vici Anjela Keintjem¹
Sri Murni²

Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Sam Ratulangi Manado

E-mail:

vicikeintjem062@student.unsrat.ac.id

srimurnirustandi@unsrat.ac.id

Abstrak: Pemberian otonomi yang luas kepada daerah kabupaten kota didasarkan atas desentralisasi yang mengemban misi utama berupa pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah yang lebih rendah, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Penelitian ini bertujuan mengetahui kinerja keuangan Kabupaten Banggai Laut tahun anggaran 2017-2019 yang dilihat dari aspek pendapatan dan belanja daerah. Metode analisis yang digunakan deskriptif kuantitatif, dengan menggunakan rasio keuangan daerah yaitu Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Pertumbuhan PAD, dan Rasio Keserasian Belanja Modal terhadap APBD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Laut berdasarkan rasio keuangan daerah yaitu Rasio Efektivitas PAD sudah sangat efektif, Rasio Keserasian Belanja modal sudah cukup baik karena telah melebihi rata-rata belanja modal. Sedangkan untuk Rasio Kemandirian dan Rasio Pertumbuhan PAD belum cukup baik. Hal ini disebabkan karena pemerintah daerah masih sangat bergantung pada pemerintah pusat dan belum mampu untuk mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang dicapai dari periode ke periode berikutnya.

Kata Kunci: Kinerja keuangan pemerintah daerah, rasio keuangan daerah

Abstract: The granting of broad autonomy to districts and cities is based on decentralization which has the main mission of delegating authority from the central government to lower levels of government, and encouraging community participation in development. This study aims to determine the financial performance of Banggai Laut Regency for the 2017-2019 fiscal year which is seen from the aspect of regional income and expenditure. The analytical method used is descriptive quantitative, using regional financial ratios, namely the Independence Ratio, PAD Effectiveness Ratio, PAD Growth Ratio, and the Harmony Ratio of Capital Expenditures to the Regional Budget. The results showed that the Financial Performance of the Banggai Laut Regency Government based on regional financial ratios, namely the PAD Effectiveness Ratio was very effective, the Capital Expenditure Harmony Ratio was quite good because it exceeded the average capital expenditure. Meanwhile, the Independence Ratio and PAD Growth Ratio are not good enough. This is because the local government is still very dependent on the central government and has not been able to maintain and improve the success achieved from period to period.

Keywords: Local government financial performance, regional financial ratio

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Lahirnya Undang-Undang (UU) No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah (Pemda) dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah merupakan awal mulanya otonomi daerah. Undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang pemerintah daerah menyebutkan bahwa otonomi daerah diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kemampuan pemerintah daerah dalam menggali kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari kinerja keuangan daerah. Kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan (Sularso dan Restianto, 2011). Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD (Halim dan Kusufi, 2012). Analisis rasio keuangan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari rasio kemandirian, rasio efektivitas PAD, rasio pertumbuhan PAD, dan rasio keserasian belanja modal.

Kabupaten Banggai Laut dibentuk berdasarkan undang-undang Nomor 5 tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Laut. Banggai Laut merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Banggai Kepulauan yang disahkan pada 14 Desember 2012 yang ber Ibu Kota Banggai dengan luas wilayah 725,67 km², memiliki 7 Kecamatan dan 66 Kelurahan. Maksud penelitian ini mengambil lokasi di Kabupaten Banggai Laut sebab peneliti merupakan penduduk Kabupaten Banggai Laut dan ingin mengetahui perkembangan kemampuan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Banggai Laut dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahannya sendiri.

Salah satu tujuan yang hendak dicapai dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah menghadirkan kemandirian daerah. Untuk mencapai kemandirian daerah, pemerintah harus berusaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah nya karena pada prinsipnya semakin besar PAD terhadap APBD menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat. Dari Laporan Realisasi APBD Kabupaten Banggai Laut Tahun 2017-2019 menunjukkan adanya permasalahan pada pendapatan yang mengalami naik turun atau fluktuasi yang terjadi pada Kabupaten Banggai Laut. Sedangkan untuk belanja daerah dari tahun 2017-2019 mengalami peningkatan.

Realisasi pendapatan dari tahun 2017-2019 mengalami fluktuasi dan jumlah pendapatan yang diperoleh dibawah dari jumlah yang dianggarkan atau tidak mencapai target, hal ini dinilai kurang baik. Menurunnya pendapatan dikarenakan pemerintah masih bergantung dari dana transfer daripada menggali sumber pendapatan didaerahnya. Hal ini dapat dilihat dari laporan realisasi APBD tahun 2017-2019 dimana sumber pendapatan terbesar berasal dari pendapatan transfer. Tahun 2017 realisasi PAD melebihi dari jumlah yang dianggarkan, tahun 2018 realisasi PAD menurun tetapi jumlah PAD yang diperoleh masih melebihi dari jumlah yang dianggarkan, penurunan PAD disebabkan oleh berkurangnya retribusi daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Tahun 2019 realisasi PAD kembali naik dan jumlah PAD yang diperoleh melebihi dari jumlah yang dianggarkan. Realisasi belanja dari tahun 2017 sampai 2019 terus meningkat namun realisasinya tidak melebihi dari jumlah yang dianggarkan. Adanya SiLPA di Kabupaten Banggai Laut tahun 2017-2019 di sebabkan karena adanya penghematan belanja dan juga berkurangnya pendapatan daerah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Kabupaten Banggai Laut dengan judul “**Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2017- 2019**”.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Kinerja Keuangan Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2017-2019, dengan menggunakan alat ukur rasio keuangan daerah.

TINJAUAN PUSTAKA

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan (Sularso dan Restianto, 2011). Kinerja Keuangan Pemerintah daerah adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran daerah dengan kuantitas yang terukur, kemampuan daerah dapat diukur dengan menilai efisiensi atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat (Mahmudi, 2016).

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah tingkat capaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi anggaran dan realisasi anggaran dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama periode anggaran.

Rasio Keuangan Pemerintah Daerah

Analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja di masa lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi-potensi kinerja yang akan berlanjut. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD (Halim dan Kusufi, 2012). Analisis rasio keuangan pada

APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi

Analisis Pendapatan

Mahmudi (2016:134) Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) mendefinisikan pendapatan sebagai semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah ekuitas dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menggambarkan ketergantungan daerah terhadap Pendapatan Transfer (sumber dana ekstern). Semakin tinggi Rasio Kemandirian Keuangan Daerah mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern semakin rendah dan dengan demikian pula sebaliknya. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama Pendapatan Asli Daerah (Halim, 2012).

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer pusat} + \text{Pinjaman}} \times 100\%$$

Rasio Efektivitas PAD

Rasio efektifitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Kemampuan daerah dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai mencapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100 persen (Halim, 2012). Rasio efektifitas dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Analisis Belanja

Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah, belanja daerah dapat didefinisikan sebagai semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan pernah diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Menurut Mahmudi (2016:153) belanja dapat dipahami sebagai kewajiban pemerintah daerah yang mengurangi kekayaan bersih yang terjadi akibat transaksi masa lalu.

Rasio Pertumbuhan PAD

Rasio pertumbuhan (growth ratio) mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang dicapai dari periode ke periode berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapatkan perhatian (Halim, 2012).

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{\text{PAD t1} - \text{PAD t0}}{\text{PAD t0}} \times 100\%$$

Rasio Belanja Modal

Rasio Belanja Modal merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah. Berdasarkan rasio ini, pembaca laporan dapat mengetahui porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi dengan bentuk belanja modal pada tahun anggaran bersangkutan. Belanja modal memberikan manfaat jangka menengah dan panjang juga bersifat rutin. Pada umumnya proporsi belanja modal terhadap total belanja daerah adalah antara 5-20% (Mahmudi, 2010).

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Belanja Modal}}{\text{Total Belanja APBD}} \times 100\%$$

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Menurut Mahsun (2011:81) menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah daftar yang memuat rincian penerimaan daerah dan pengeluaran/ belanja daerah selama satu tahun. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan peraturan daerah untuk masa satu tahun, mulai dari 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 Pasal 1 Ayat 1, pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Struktur APBD menurut Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 merupakan satu kesatuan yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Penelitian Terdahulu

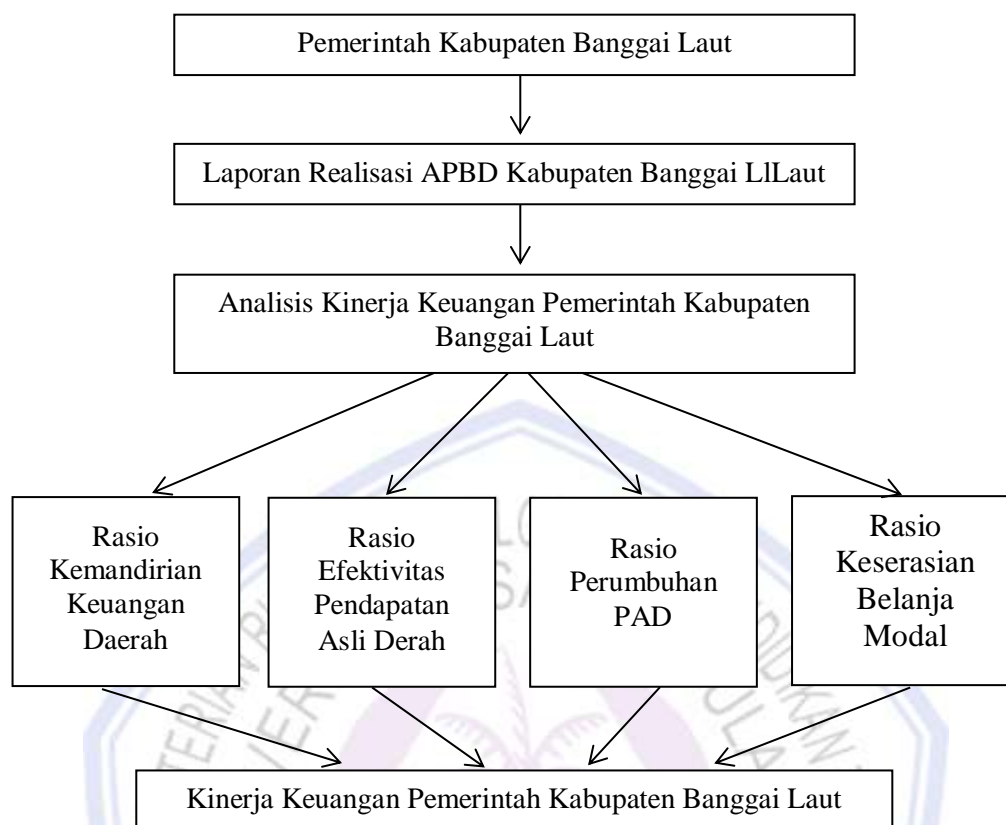
Ngangi, Sri Murni, dan Untu (2018) meneliti tentang Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, dengan menggunakan Rasio Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yaitu Rasio Kemandirian, Rasio Efisiensi, Rasio Desentralisasi, Rasio Pertumbuhan dan Rasio Keserasian Belanja Modal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Rasio Keuangan Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan yang dilihat dari Rasio Efisiensi dan Rasio Pertumbuhan, dikatakan baik dan efisien. Sedangkan jika dilihat dari Rasio Desentralisasi, Rasio Kemandirian dan Rasio Keserasian Belanja Modal masih sangat kurang.

Pauwah, Saerang, dan Mandey (2014) meneliti tentang Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pada Pemda Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan rasio kemandirian dapat dikategorikan baik, ratarata realisasi PAD masih cukup efektif, aktifitas pemerintah dalam membelanjakan dana sebagian besar untuk belanja rutin dari pada belanja pembangunan dan rasio pertumbuhan kinerja pengelolaan keuangan Kabupaten Sula dapat dikategorikan cukup baik karena pertumbuhan PAD masih fluktuatif.

Soamole, Mangantar, dan Tulung (2018) meneliti tentang Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula Sebelum Dan Sesudah Pemekaran Pulau Taliabu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio efisiensi PAD, rasio keserasian belanja operasi, rasio keserasian belanja modal pada kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula lebih baik saat sesudah pemekaran pulau taliabu. Sedangkan, derajat desentralisasi, rasio kemandirian dan rasio pertumbuhan PAD pada kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula lebih baik saat sebelum pemekaran pulau taliabu. Dan berdasarkan uji simultan paired sample T test, menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan Kabupaten Kepulauan Sula sebelum dan sesudah pemekaran pulau taliabu.

Hipotesis dan Model Penelitian

- H1: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Laut sudah baik jika dilihat dari Rasio Kemandirian
- H2: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Laut sudah baik jika dilihat dari Rasio Efektivitas PAD
- H3: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Laut sudah baik jika dilihat dari Rasio Pertumbuhan PAD
- H4: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Laut sudah baik jika dilihat dari Rasio Keserasian Belanja Modal

Model Penelitian**Gambar 1. Model Penelitian***Sumber: Kajian Empirik (2020)***METODE PENELITIAN****Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan pendekatan penelitian deskriptif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menekankan analisisnya pada data-data numerical (angka) yang diolah dengan metode statistika. Adapun pengertian deskriptif menurut Sugiyono (2012:29) adalah metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku umum.

Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian di tarik kesimpulan (Sugiyono, 41 2012:115).Populasi dalam penelitian ini adalah data laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Laut. Menurut Efferin (2008: 74) sampel adalah bagian dari populasi yang memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai obyek penelitian.Adapun sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah data Laporan Realisasi APBD tahun 2017- 2019.

Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Laut tahun 2017-2019 yang diperoleh secara resmi dari Kantor BPKAD Kabupaten Banggai Laut.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan data dan mempelajari dokumen yang berkaitan dengan seluruh data yang diperlukan dalam penelitian. Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data yang diperoleh dari Kantor BPKAD Kabupaten Banggai Laut.

Teknik Analisis Data

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan maka teknik analisa data yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Adapun tolak ukur yang digunakan dalam teknik analisis ini adalah Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Pertumbuhan PAD dan Rasio Kecerahan Belanja Modal

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dekripsi Objek Penelitian

Gambaran Umum Kabupaten Banggai Laut

Kabupaten Banggai Laut merupakan salah satu di antara 13 Kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah dengan Ibu Kota berkedudukan di kota Banggai di bentuk berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No 5 Tahun 2013. Banggai Laut merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Banggai Kepulauan yang disahkan dalam sidang paripurna DPR RI pada 14 Desember 2012 di gedung DPR RI tentang Rancangan UU Daerah Otonomi Baru (DOB). Berada pada kawasan Teluk Tolo yang mempunyai potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang sangat potensial untuk dikembangkan di kawasan Timur Indonesia (KTI).

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Banggai Laut

Kabupaten Banggai Laut di bentuk sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB) berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2013, yaitu untuk mendorong perkembangan dan kemajuan di Provinsi Sulawesi Tengah, khususnya di Kabupaten Banggai Laut, sebagaimana aspirasi yang berkembang dalam masyarakat serta keinginan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Selain itu dengan terbentuknya Kabupaten Banggai Laut juga memperhatikan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, politik, jumlah penduduk, luas daerah, kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat, rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan, dan meningkatnya beban tugas dan volume kerja dibidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Kabupaten Banggai Laut.

Hasil Penelitian

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Tabel 4.1 Rasio Kemandirian Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2017- 2019

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (RP)	Transfer Pusat + Pinjaman (RP)	Rasio (%)	Pola Hubungan
2017	30.317.151.107	588.872.642.527	5,15%	Instruktif
2018	21.776.178.733	575.575.852.495	3,78%	Instruktif
2019	25.803.225.523	606.153.680.333	4,26%	Instruktif

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kabupaten Banggai Laut (Data diolah, 2021)

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa tingkat kemandirian keuangan Kabupaten Banggai Laut tahun 2017-2019 masih sangat rendah dan pola hubungannya termasuk pola hubungan instruktif. Tahun 2017 rasio kemandirian sebesar 5,15%, tahun 2018 menurun menjadi 3,78% dan tahun 2019 kembali naik menjadi 4,26%

Rasio Efektivitas PAD

Tabel 4.2 Rasio Efektivitas PAD Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2017- 2019

Tahun	Anggaran PAD (RP)	Realisasi PAD (RP)	Rasio (%)	Kriteria
2017	29.221.808.817	30.317.151.107	103,75	Sangat Efektif
2018	18.690.261.384	21.776.178.733	116,51	Sangat Efektif
2019	25.674.580.930	25.803.225.523	100,50	Sangat Efektif

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kabupaten Banggai Laut (Data diolah, 2021)

Berdasarkan perhitungan tabel di atas, menunjukkan bahwa Efektivitas PAD Kabupaten Banggai Laut dari tahun 2017 sampai 2019 sangat efektif. Pada tahun 2017 rasio efektivitas sebesar 103,75% dimana realisasi PAD lebih besar dari target yang ditetapkan. Tahun 2018 rasio efektivitas meningkat menjadi 116,51% walaupun realisasi

PAD menurun tetapi realisasi melebihi dari target yang ditetapkan. Tahun 2019 rasio efektivitas mengalami penurunan menjadi 100,50% tetapi masih dikatakan sangat efektif karena realisasi PAD melebihi dari target yang ditetapkan.

Rasio Pertumbuhan PAD

Tabel 4.3 Rasio Pertumbuhan PAD Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2017-2019

Tahun	PAD Tahun (t) (RP)	PAD Tahun (t-1) (RP)	Rasio (%)	Pertumbuhan
2017	30.317.151.107	19.818.492.878	52,97	Positif
2018	21.776.178.733	30.317.151.107	(28,17)	Negatif
2019	25.803.225.523	21.776.178.733	18,49	Positif

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kabupaten Banggai Laut (Data diolah, 2021)

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan Kabupaten Banggai Laut pada tahun 2017 sebesar 52,97%. Pada tahun 2018 terjadi penurunan yang signifikan karena mengalami pertumbuhan yang negatif hingga menyentuh -28,17%. Tahun 2019 pertumbuhan kembali naik menjadi 18,49%.

Rasio Keserasian Belanja Modal

Tabel 4.4 Rasio Keserasian Belanja Modal Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2017-2019

Tahun	Total Belanja Daerah (RP)	Realisasi Belanja Modal (RP)	Rasio (%)
2017	583.627.646.002	197.037.084.940	33,76
2018	629.435.116.530	219.201.272.002	34,83
2019	720.884.524.124	238.073.778.383	33,03

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kabupaten Banggai Laut (Data diolah, 2021)

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa rasio belanja modal Kabupaten Banggai Laut tahun 2017 sebesar 33,76%, mengalami peningkatan pada tahun 2018 sebesar 34,83%. Namun tahun 2019 kembali menurun menjadi 33,03%.

Pembahasan Hasil

Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Hasil Analisis ini menunjukkan bahwa kemampuan keuangan Kabupaten Banggai laut tahun anggaran 2017-2019 masih sangat rendah dan termasuk dalam pola hubungan instruktif dimana peran pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah, hal ini dapat dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dari tahun 2017-2019 kurang dari 25%. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Laut belum baik jika dilihat dari Rasio Kemandirian.

Penelitian Ngangi, Sri Murni, dan Untu (2018) dalam study Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan tahun 2012-2016 rasio kemandirian tergolong sangat rendah dan menunjukkan pola hubungan instruktif yang berarti peran pemerintah pusat lebih dominan dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah, hal ini ditunjukkan dari rata-rata rasio kemandirian kurang dari 25%. Berbeda dengan penelitian Sulisty (2018) dalam study Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di mana rasio kemandirian menunjukkan hasil yang baik dengan rata-rata rasio kemandirian 99,97% dan menunjukkan pola hubungan delegatif yang mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat semakin kecil karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

Analisis Rasio Efektivitas PAD

Hasil analisis ini menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah daerah Kabupaten Banggai Laut dalam merealisasikan PAD melebihi dari target yang ditetapkan. Rasio efektivitas PAD Kabupaten Banggai Laut tahun anggaran 2017-2019 secara keseluruhan memiliki rata-rata sebesar 106,92% dan dikategorikan sangat efektif karena rasio yang dicapai melebihi 100%. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Laut sudah baik jika dilihat dari Rasio Efektivitas PAD.

Penelitian Wonda (2016) dalam study Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Masa Otonomi Daerah Kabupaten Nabire Provinsi Papua dimana Rasio efektivitas PAD tahun anggaran 2011-2013 baik karena presentase yang diperoleh melebihi melebihi satu atau 100%. Jadi kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten Nabire dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang

ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah adalah baik. Berbeda dengan penelitian Tambuwun, Pangemanan dan Afandi (2014) dalam study Analisis Kinerja Keuangan Pemerintahan Kota Manado dimana hasil menunjukkan bahwa efektivitas realiasi penerimaan PAD Pemerintah Kota Manado tahun 2011-2013 dikatakan cukup efektif dengan rata-rata rasio sebesar 98,07%.

Analisis Rasio Pertumbuhan PAD

Hasil analisis menunjukkan bahwa Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2017-2019 berdasarkan Rasio Pertumbuhan PAD mengalami pertumbuhan yang positif meskipun fluktuatif karena terjadi penurunan yang signifikan pada tahun 2018 sebesar -28,17%. Ratarata rasio pertumbuhan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 yaitu sebesar 14,43% atau dapat dikategorikan rendah. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Laut belum baik jika dilihat dari Rasio Pertumbuhan PAD

Penelitian Pauwah, Saerang, dan Mandey (2014) dalam study Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pada Pemda Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara dilihat dari rasio pertumbuhan kinerja pengelolaan keuangan Kabupaten Kepulauan Sula dapat dikategorikan belum cukup baik karena pertumbuhan PAD masih fluktuatif. Berbeda dengan penelitian Ngangi, Sri Murni, dan Untu (2018) dalam study Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan tahun 2012-2016. Kabupaten Sorong Selatan mengalami pertumbuhan yang positif dimana rata-rata pertumbuhan yang positif itu adalah 40%. Meskipun dalam 5 tahun anggaran kabupaten ini mengalami perubahan yang fluktuatif, namun dapat dikatakan Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan masih mampu dalam mempertahankan peningkatan perekonomiannya.

Analisis Rasio Keserasian Belanja Modal

Hasil analisis menunjukkan bahwa rata-rata Rasio Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Laut tahun anggaran 2017-2019 sebesar 33,87%. Hal ini berarti sebagian dana yang dimiliki Pemerintah Daerah masih diprioritaskan untuk kebutuhan belanja operasi karena persentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin sedikit lebih banyak.

Penelitian Soamole, Mangantar, dan Tulung dalam study Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula Sebelum Dan Sesudah Pemekaran Pulau Taliabu. Keserasian belanja modal Kabupaten Kepulauan Sula memiliki tingkat pendapatan yang tinggi sehingga tingkat belanja modal untuk investasi masih cukup rendah. Berbeda dengan penelitian Penelitian Ngangi, Sri Murni, dan Untu (2018) dalam study Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan tahun 2012-2016. Untuk Rasio Belanja Modal Daerah yang setiap tahunnya mengalami kenaikan yang fluktuatif maka dapat dikatakan bahwa porsi belanja daerah untuk investasi cukup besar pada Kabupaten Sorong Selatan dan porsi belanja daerah sebagian dana dialokasikan untuk belanja modal, dan masuk dalam kategori kurang serasi.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan Penelitian ini adalah:

1. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Laut jika dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah masih sangat rendah dan termasuk dalam pola hubungan instruktif karena masih tergolong dalam interval 0- 25%, yang berarti peran pemerintah pusat masih sangat dominan dan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat masih tergantung pada pihak eksternal.
2. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Laut jika dilihat dari Rasio Efektivitas sudah baik dan sangat efektif karena rasio yang dicapai lebih dari 100%, yang berarti kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan. Fashion Involvement berpengaruh tapi tidak signifikan terhadap Impulse Buying Behaviour konsumen PT Matahari Departement Store Mega Mall Manado.
3. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Laut jika dilihat dari Rasio Pertumbuhan PAD secara rata-rata mengalami pertumbuhan yang positif namun masih masuk dalam kategori rendah. Pemerintah daerah Kabupaten Banggai Laut belum mampu dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang dicapai dari periode ke periode berikutnya.
4. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Laut jika dilihat dari Rasio Keserasian Belanja Modal cukup baik karena meskipun sebagian dana yang dimiliki pemerintah daerah masih diprioritaskan untuk kebutuhan belanja operasi akan tetapi daerah Kabupaten Banggai laut telah melebihi rata-rata belanja modal yang biasanya ada di kisaran 5-20%.

Saran

Saran dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Laut diharapkan dapat mengurangi ketergantungannya terhadap bantuan dari pemerintah pusat dengan lebih meningkatkan dan memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah dan mengoptimalkan potensi sumber pendapatan yang ada, potensi tersebut salah satunya di bidang pariwisata. Kabupaten Banggai Laut juga diharapkan untuk dapat mempertahankan kinerja keuangan daerah dengan baik dan meningkatkan perekonomian daerahnya dari periode ke periode berikutnya, sertameningkatkan pembangunan, penyediaan sarana prasarana ekonomi dan layanan publik untuk kesejahteraan masyarakat, perekonomian dan untuk menarik investor..
2. Bagi Peneliti Selanjutnya, bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian yang sama di daerah Kabupaten Banggai Laut diharapkan untuk menambah periode penelitian dan metode penelitian sebagai alat pengukurannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim & Syam Kusufi. 2012. *Akuntansi Sektor Publik: teori, konsep dan aplikasi*. Salemba Empat: Jakarta..
- Abdul Halim. 2012 *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*.Keempat. Salemba Empat. Jakarta
- Efferin, Sujoko dkk.2008. *Metode Penelitian Akuntansi: Mengungkap Fenomena dengan pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif*. GRAHA ILMU, Yogyakarta
- Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. *Internet*.<http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=5412>. Diakses tanggal 6 Maret 2020
- Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*.UPP Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN: Yogyakarta.
- Mahmudi.2016. *Analisis Laporan keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mailangkay, P. P. U., Murni, S., dan Rate, P. V. (2020).Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Bitung.*Jurnal EMBA*, Vol.8 No.3, 278 -285. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba>. Diakses tanggal 29 Januari 2021.
- Ngangi, A. I., Murni, S., dan Untu, V. N. (2018).Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan. *Jurnal EMBA*, Vol.6 No.4, 4103 – 4112. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba>. Diakses tanggal 11 Januari 2021
- Pauwah, S., Saerang, I., dan Mandey, S. (2014).Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pada Pemda Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara. *Jurnal EMBA*, Vol.2 No.3, 001-012. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba>. Diakses tanggal 4 Maret 2021
- Pemerintah Republik Indonesia.2004. Undang-undang nomor 33 tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia.2006. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2013. Undang-undang Nomor 5 tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Laut.
- Pemerintah Republik Indonesia.2014. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia.2015. Undang-undang nomor 9 tahun 2015, tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta.

- Soamole, F., Mangantar, M., dan Tulung, J. E. (2018). Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula Sebelum Dan Sesudah Pemekaran Pulau Taliabu. *Jurnal EMBA*, Vol.6 No.3, 1588 – 1597. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba>. Diakses tanggal 4 Maret 2021
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sularso, Havid., Restianto, Yanuar E. 2011. *Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah*. Media Riset Ekonomi. Purwokerto.
- Sulistyo, A. T. (2018). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. *Indonesian Treasury Review*, Vol. 3 (No.1), 43-59. <https://itrev.kemenkeu.go.id/index.php/ITRev/article/view/22/15>. Diakses tanggal 13 Februari 2020
- Tambuwun, E. L., Pangemanan, S. S., dan Afandi, D. (2014). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintahan Kota Manado. *Jurnal EMBA*, Vol. 2 (No.4), 81-89. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/6220>. Diakses tanggal 14 Mei 2020
- Wonda, W. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Masa Otonomi Daerah Kabupaten Nabire Provinsi. *Jurnal EMBA*, Vol. 4 (No.3), 192-200. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/13668>. Diakses tanggal 13 Februari 2020.

